



Hubungan Antara Urbanisasi dan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis Dampak Migrasi, Permukiman Kumuh, dan Ketimpangan Perkotaan

Ikram¹; Radian Safira²; Fitriyaningsi³

^{1,3}*Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia*

²*Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus, Indonesia*

¹*Correspondence Email: ickramerick2024@gmail.com*

Received: 14 Agustus 2024	Accepted: 20 September 2024	Published: 25 September 2024
---------------------------	-----------------------------	------------------------------

Abstract

*Urbanisasi yang pesat di berbagai wilayah dunia telah menimbulkan dinamika kompleks yang berkaitan erat dengan migrasi, pertumbuhan permukiman kumuh, dan ketimpangan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan dengan menelaah dampak migrasi, perkembangan permukiman kumuh, serta ketimpangan dalam akses layanan dasar di kawasan perkotaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode **Systematic Literature Review (SLR)** berbasis analisis data dari database Dimensions dan Scopus, dengan cakupan publikasi 5 tahun terakhir (2020–2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa migrasi berperan signifikan dalam mendorong urbanisasi dan transformasi infrastruktur kota, namun juga memicu pertumbuhan kawasan kumuh akibat keterbatasan kapasitas pemerintah dalam penyediaan hunian layak. Selain itu, ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti perumahan, sanitasi, dan transportasi masih dipengaruhi oleh identitas sosial, geografis, dan gender. Temuan ini menyoroti pentingnya perumusan kebijakan pembangunan kota yang inklusif, berbasis bukti, serta responsif terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam menyatukan tiga variabel utama tersebut ke dalam satu kerangka analisis terpadu untuk memperkuat strategi pembangunan perkotaan berkelanjutan.*

Keywords *Urbanisasi; Kemiskinan; Ketimpangan*

A. Pendahuluan

Urbanisasi merupakan proses transformasi wilayah dari karakteristik pedesaan menuju perkotaan yang diiringi dengan perubahan struktur ekonomi, sosial, dan fisik. Sementara urbanisasi pada awalnya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan akibat migrasi yang cepat dan ketidaksiapan infrastruktur dasar kota, dalam jangka panjang proses ini berpotensi mengurangi kemiskinan jika dikelola secara efektif melalui kebijakan pembangunan yang terencana dan inklusif (Bashir, 2023). Dinamika ini menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam konteks pembangunan berkelanjutan di kawasan urban, terutama dalam pengelolaan ruang, layanan publik, dan perumahan.

Kemiskinan perkotaan kerap kali mencerminkan ketimpangan distribusi sumber daya di dalam wilayah perkotaan, yang berdampak pada kesenjangan akses terhadap perumahan layak, air bersih, sanitasi, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan ini tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosio-spasial, di mana kelompok marjinal seperti minoritas agama, kasta terjadwal, perempuan, dan masyarakat adat mengalami diskriminasi struktural dalam memperoleh layanan dasar (Vives-Miró, 2022). Ketidakadilan ini memperparah siklus kemiskinan dan membatasi mobilitas sosial masyarakat miskin perkotaan. Kota Mataram, yang terletak di Pulau Lombok, Indonesia, telah menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di tengah kemajuan ini, tingkat kemiskinan di kota tersebut terus menjadi isu yang signifikan. Perubahan yang tidak stabil dalam tingkat kemiskinan Kota Mataram selama dekade terakhir menjadi perhatian utama, menggarisbawahi pentingnya melakukan analisis mendalam untuk mengungkap faktor-faktor yang berperan dalam fluktuasi ini (Pratama, 2023).

Migrasi menjadi pendorong utama pertumbuhan populasi perkotaan dan transformasi demografis kota di berbagai belahan dunia. Di Eropa, peningkatan migrasi bersih telah menyebabkan perubahan dari de-densifikasi ke densifikasi kawasan perkotaan selama periode 2012–2018 (Cortinovis et al., 2022). Di Amerika Serikat, migrasi di sepanjang kontinum pedesaan-perkotaan mendorong pergeseran populasi ke pinggiran metropolitan, terutama di wilayah Selatan dan Barat (Golding & Winkler,

2020). Di China, arus migrasi desa-kota berkontribusi pada lonjakan kebutuhan perumahan, mendorong pertumbuhan pasar properti dan kenaikan harga rumah yang berdampak pada transformasi struktural ekonomi serta perencanaan perkotaan (Garriga et al., 2023). Selain itu, migrasi turut memaksa pemerintah kota menyesuaikan kebijakan kelembagaan dan perencanaan ruang kota guna mengakomodasi perubahan demografis baru (Barbarino et al., 2021); ((Yamamura, 2022). Meski memberi dorongan ekonomi, arus migrasi ini juga menimbulkan tekanan pada ketersediaan perumahan dan ketegangan sosial di perkotaan.

Pertumbuhan permukiman kumuh merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan antara arus migrasi urban dengan kapasitas infrastruktur perkotaan. Di kota-kota besar seperti Palembang, Indonesia, permukiman kumuh telah mencakup 4.451 hektar lahan sebagai akibat dari ketidaksiapan pemerintah menyediakan perumahan layak bagi penduduk miskin baru (Utari, 2023). Migrasi yang didorong oleh kemiskinan memperparah situasi ini, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan (Tariq et al., 2023). yang mengungkapkan bahwa pendatang baru lebih sering bermukim di kawasan informal karena keterbatasan pilihan hunian terjangkau. Di sisi lain, buruknya infrastruktur sanitasi di kawasan kumuh, seperti di Namatala, Uganda, meningkatkan risiko kesehatan lingkungan (Manana, 2023). Ketidakberhasilan pelaksanaan program perbaikan perumahan, seperti di Palembang, menunjukkan lemahnya kapasitas implementasi kebijakan tata kota (Utari, 2023). Meski demikian, beberapa studi menyoroti potensi daerah kumuh sebagai pusat solidaritas komunitas dan inovasi sosial berbasis akar rumput.

Ketimpangan sosial dalam akses layanan dasar di perkotaan terwujud melalui diskriminasi berbasis identitas sosial dan geografi. Di India, kelompok dari kasta terjadwal dan minoritas agama mengalami keterbatasan akses terhadap perumahan, air minum, dan sanitasi yang memadai (Mishra, 2023). Hambatan gender juga menjadi faktor signifikan, di mana perempuan di kawasan perkotaan Turki melaporkan ketidakpuasan terhadap infrastruktur layanan sosial. Di China dan Kolombia, ketimpangan spasial menghambat akses ke fasilitas umum dan transportasi, khususnya bagi kelompok miskin (Xiao et al., 2022). Masyarakat adat di Kanada pun

menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan meski tinggal di wilayah perkotaan (Graham et al., 2023).

Meskipun terdapat berbagai inisiatif kebijakan untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini, efektivitas pelaksanaannya masih beragam dan memerlukan upaya terpadu. Secara keseluruhan, isu kemiskinan tetap menjadi fokus penting untuk terus diselidiki. Tidak hanya karena kemiskinan telah menjadi masalah yang ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini, tetapi juga karena gejalanya semakin memburuk seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun kemiskinan berakar pada individu atau perorangan, hal ini tidak berarti bahwa tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini hanya ada pada individu tersebut. Sebaliknya, masalah ini harus menjadi perhatian bersama bagi seluruh elemen masyarakat atau pemangku kepentingan untuk menanggulangi permasalahan yang kompleks ini. (Andini et al., 2024)

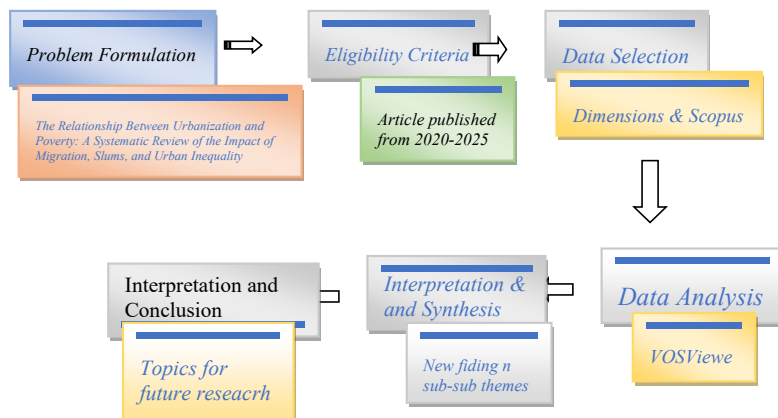
Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian terkait migrasi, permukiman kumuh, dan ketimpangan perkotaan masih dilakukan secara parsial dan belum mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu kerangka sistematis. Selain itu, sedikit studi yang menghubungkan dampak migrasi terhadap pertumbuhan kawasan kumuh serta ketimpangan akses layanan dasar secara simultan dalam konteks urbanisasi. Penelitian ini memiliki novelty dengan menawarkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengevaluasi keterkaitan antara ketiga variabel tersebut secara terpadu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan dalam memahami Hubungan Antara Urbanisasi dan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis Dampak Migrasi, Permukiman Kumuh, dan Ketimpangan Perkotaan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai Hubungan Antara Urbanisasi dan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis Dampak Migrasi, Permukiman Kumuh, dan Ketimpangan Perkotaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan

menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 5 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Hubungan Antara Urbanisasi dan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis Dampak Migrasi, Permukiman Kumuh, dan Ketimpangan Perkotaan

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Hubungan Antara Urbanisasi dan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis Dampak Migrasi, Permukiman Kumuh, dan Ketimpangan Perkotaan; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur penelitian

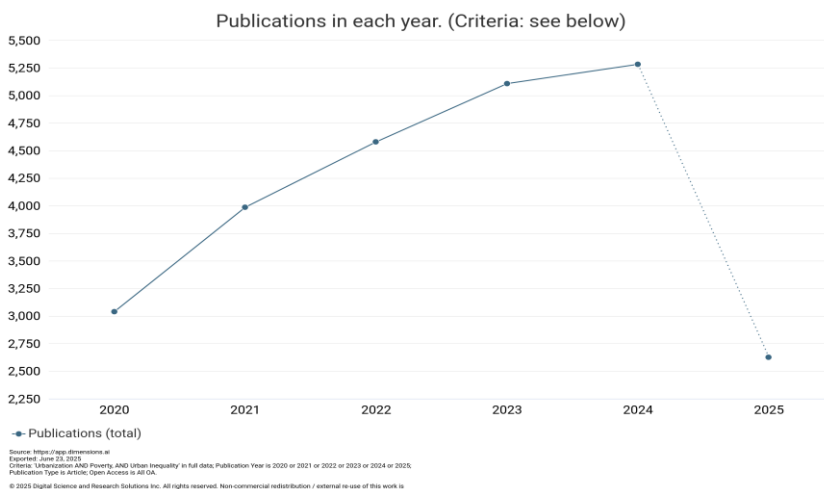
Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu **Hubungan Antara Urbanisasi dan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis Dampak Migrasi, Permukiman Kumuh, dan Ketimpangan Perkotaan**. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai

dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti “**(Urbanisasi dan Kemiskinan dan Ketimpangan Perkotaan) atau (Urbanization and Poverty and Urban Inequality)**”. Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Hubungan Antara Urbanisasi dan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis Dampak Migrasi, Permukiman Kumuh, dan Ketimpangan Perkotaan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Seleksi Data

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 252,307 data, meliputi data *open access* sebanyak 58,239 data dan sisanya adalah *close access*. Dari 58,239 data tersebut, terdapat 41,883 data merupakan artikel dan 16,356 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 24,619 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade

Gambar 2 menunjukkan bahwa **Sumbu X (Horizontal):** Tahun publikasi: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. **Sumbu Y (Vertikal):** Jumlah total publikasi (dalam satuan publikasi), berkisar antara 2.250 hingga 5.500 publikasi.

1. Tren Kenaikan (2020–2024):

- Terjadi **peningkatan jumlah publikasi dari tahun 2020 ke 2024.**
- Tahun 2020: 3.039 publikasi.
- Tahun 2021: 3.986 publikasi.
- Tahun 2022: 4.579 publikasi.
- Tahun 2023: 5.107 publikasi.
- Tahun 2024: 5.282 publikasi.

2. Penurunan Tajam (2025):

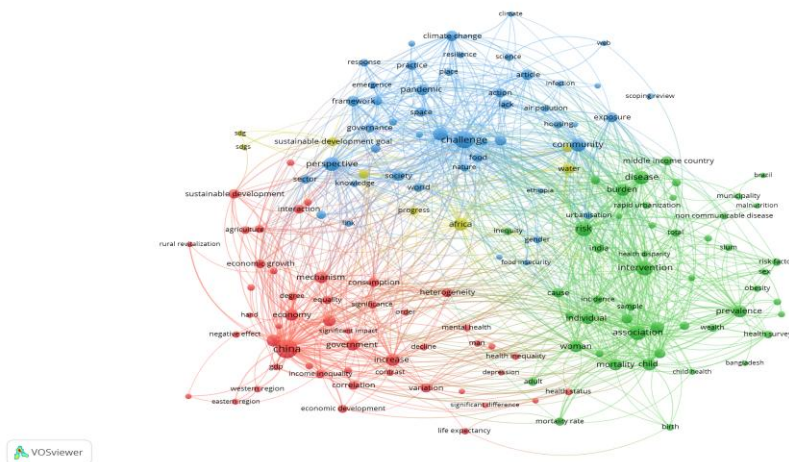
- Terjadi **penurunan drastis jumlah publikasi di tahun 2025: 2.262 publikasi.**
- Penurunan ini ditandai dengan garis putus-putus, menunjukkan kemungkinan **data tahun 2025 belum lengkap (karena baru pertengahan tahun atau ongoing collection).**

3. Kriteria Data (dari keterangan bawah grafik):

- Topik: **Urbanization and Poverty and Urban Inequality.**
- Tahun publikasi: 2020–2025.
- Jenis publikasi: Artikel jurnal (Article).
- Akses terbuka: Semua (Open Access: All OA).
- Sumber data: Dimensions.ai.

2. Network Visualization of Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Network visualization dari variabel penelitian

Figure 3 is a network visualization of all the variables studied over the past 10 years and depicts four different color groups: green, red, yellow, and blue. The interpretation of each variable is as follows.

a. Klaster Hijau: Kesehatan, Urbanisasi, dan Kemiskinan Perkotaan.

Klaster ini menggambarkan hubungan antara urbanisasi cepat, kemunculan permukiman kumuh (slum), dan tingginya risiko masalah kesehatan seperti malnutrisi, obesitas, dan penyakit tidak menular. Perhatian besar diarahkan pada ketimpangan kesehatan anak, tingkat mortalitas bayi dan balita, serta dampak sosial ekonomi perkotaan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Negara berkembang seperti India, Bangladesh, dan Brazil menjadi konteks utama.

b. Klaster Biru: Perubahan Iklim, Pandemi, dan Resiliensi Sosial

Klaster ini berisi tentang **perubahan iklim** dan **dampaknya terhadap kerentanan sosial**, terutama di Afrika. Pandemi juga menjadi topik utama yang memperkuat tantangan ketahanan komunitas (resilience) di tengah krisis iklim dan ketidakpastian pasokan makanan dan air. Polusi udara, infeksi, serta upaya respons dan adaptasi menjadi aspek penting dalam ketahanan masyarakat miskin.

c. Klaster Merah: Ekonomi, Ketimpangan, dan Pemerintahan

Klaster ini berfokus pada keterkaitan antara **pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan**, dan peran **pemerintah** dalam pembangunan wilayah, terutama di negara seperti China. Isu ketimpangan regional, revitalisasi pedesaan, serta perbedaan kesejahteraan antar-wilayah menjadi perhatian utama. Faktor konsumsi, pembangunan berkelanjutan, dan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap kesehatan mental dan harapan hidup juga turut menjadi perhatian.

d. Klaster Kuning: SDGs dan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Klaster ini menghubungkan semua tema di atas dalam kerangka **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**, terutama tujuan pertama (No Poverty), ketiga (Good Health), dan kesebelas (Sustainable Cities). Perspektif lintas sektor dan pentingnya integrasi pengetahuan untuk memahami kompleksitas masalah menjadi titik fokus.

Berdasarkan pembagian klaster, peneliti dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut.

a. **Pola dan Dampak Migrasi Terhadap Perkembangan Urbanisasi di Wilayah Perkotaan**

Pola migrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan urbanisasi, terutama dalam membentuk tren demografis serta perubahan penggunaan lahan di kawasan perkotaan. Di Amerika Serikat, migrasi menunjukkan kecenderungan pergeseran dari daerah pedesaan ke wilayah pinggiran metropolitan, di mana kawasan pedesaan mengalami peningkatan arus keluar penduduk, sementara pusat kota di wilayah Selatan dan Barat menarik masuk para migran baru (Golding & Winkler, 2020). Fenomena serupa terjadi di Tiongkok melalui pola migrasi urban-to-urban floating population (UUFPP), di mana para migran cenderung memilih kota-kota dengan fasilitas publik dan akses pendidikan yang lebih baik, sehingga menunjukkan bahwa preferensi kualitas hidup menjadi faktor penentu yang dominan, melampaui pertimbangan ekonomi semata (Wang et al., 2022).

Perkembangan fluktuasi yang signifikan dalam tingkat kemiskinan di kota ini selama periode tersebut. Pada awal dekade, terdapat penurunan yang mencolok dalam tingkat kemiskinan yang kemungkinan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial yang efektif. Namun, pada tahun-tahun terakhir, terjadi peningkatan kembali dalam tingkat kemiskinan, yang diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang kompleks (Pratama, 2023). Urbanisasi yang dipicu oleh arus migrasi ini berdampak nyata terhadap perubahan fungsi dan penggunaan lahan di daerah perkotaan. Contohnya, di kawasan Delta Sungai Yangtze, pertumbuhan kawasan terbangun meningkat pesat sehingga menciptakan tekanan ekologis baru akibat meluasnya permukaan kedap air yang berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan (Zhang et al., 2022). Selain itu, sebagai respon terhadap peningkatan kepadatan perkotaan, beberapa kota mulai mengembangkan pemanfaatan ruang bawah tanah guna mengurangi kemacetan di permukaan tanah dan mendorong terciptanya tata kota yang lebih berkelanjutan (Samuel T Ariaratnam & Bahaa Chammout, 2021). Transformasi ini memperlihatkan betapa migrasi bukan hanya sekedar fenomena pergerakan penduduk, melainkan turut mengubah wajah fisik kota serta menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan ekosistem perkotaan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola migrasi memiliki keterkaitan erat dengan dinamika urbanisasi, baik dalam aspek demografi, perubahan penggunaan lahan, maupun transformasi infrastruktur perkotaan. Di satu sisi, migrasi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas kota; di sisi lain, hal ini menimbulkan permasalahan ekologis seperti degradasi lingkungan dan ketegangan terhadap ketersediaan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, dalam konteks **"Pola dan Dampak Migrasi Terhadap Perkembangan Urbanisasi di Wilayah Perkotaan"**, perencanaan kota di masa depan harus mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan migran, pemenuhan kebutuhan fasilitas publik, serta pengelolaan ruang secara berkelanjutan untuk meminimalisir dampak negatif urbanisasi yang tidak terkontrol.

b. Dinamika Permukiman Kumuh sebagai Konsekuensi Urbanisasi dan Ketimpangan Sosial.

Urbanisasi yang berlangsung secara cepat di berbagai negara berkembang telah memicu pertumbuhan kawasan permukiman kumuh (informal settlement) sebagai respons atas kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau di tengah terbatasnya perumahan formal. Di kota-kota besar seperti Bangkok, ekspansi kawasan kumuh mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar akibat proses urbanisasi yang tidak inklusif (Changsoo, 2023). Sementara itu, di Dhaka, kebijakan neoliberal justru memperparah marginalisasi penduduk kawasan kumuh melalui pembatasan akses terhadap sumber daya kota dan kurangnya representasi politik, sehingga menciptakan eksklusi ganda bagi masyarakat miskin perkotaan (Arefin, 2023). Fenomena serupa juga terjadi di Kolombia, di mana kebijakan tata ruang perkotaan mendorong komodifikasi lahan dan secara tidak langsung melanggengkan lahirnya permukiman informal sebagai bagian dari dinamika kapitalisme urban (Zuluaga & Vargas, 2020).

Kondisi kehidupan di kawasan kumuh umumnya ditandai oleh kualitas infrastruktur yang rendah, akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi, serta kurangnya fasilitas dasar lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan penghuni (Manana, 2023). Di berbagai kota, termasuk di kawasan Namatala, Uganda, ketidakmampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif serta kurangnya kemauan politik memperburuk permasalahan tersebut, mengakibatkan penghuni kawasan kumuh tetap terpinggirkan dari agenda pembangunan kota (Arefin, 2023). Padahal, penguatan tata kelola berbasis inklusi sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan kelompok ini secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika permukiman kumuh merupakan konsekuensi langsung dari ketidakseimbangan antara laju urbanisasi dengan kapasitas pemerintah dalam menyediakan perumahan layak huni dan layanan dasar. Permukiman kumuh tidak hanya mencerminkan kegagalan tata kelola perkotaan, tetapi juga mempertegas

ketimpangan sosial yang sistemik di lingkungan perkotaan. Dalam konteks “Dinamika Permukiman Kumuh sebagai Konsekuensi Urbanisasi dan Ketimpangan Sosial”, kawasan ini sekaligus dapat dipandang sebagai ruang resistensi dan solidaritas sosial, di mana masyarakat mengembangkan jejaring informal guna bertahan hidup di tengah keterbatasan struktural. Oleh karena itu, upaya perbaikan permukiman kumuh harus disertai dengan reformasi tata kelola kota yang inklusif dan berpihak kepada kelompok marjinal.

c. Ketimpangan Perkotaan: Akses terhadap Layanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial.

Kemiskinan merupakan hal yang melibatkan beragam faktor yang saling terkait, menciptakan masalah yang kompleks. Tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor faktor sosial-budaya yang memengaruhi akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, norma sosial, dan peluang dalam masyarakat.(Pratama, 2023). Ketimpangan perkotaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi distribusi akses terhadap layanan dasar dan kesejahteraan sosial di kawasan perkotaan, di mana identitas sosial seperti kasta, agama, dan etnisitas memainkan peran signifikan. Di India, misalnya, sistem kasta dan afiliasi agama secara langsung memengaruhi akses kelompok terpinggirkan terhadap perumahan layak dan fasilitas publik, sehingga memperbesar jurang ketimpangan sosial di perkotaan(Mishra, 2023).

Aspek gender juga terbukti berperan dalam memperkuat ketimpangan perkotaan, seperti yang terungkap di Çankaya, Turki, di mana perempuan menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi terhadap fasilitas sosial yang tersedia akibat infrastruktur kota yang tidak sensitif terhadap kebutuhan gender, seperti kurangnya ruang publik yang aman atau layanan khusus perempuan. Kondisi ini mencerminkan kurangnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan kota modern, yang pada akhirnya memperdalam kesenjangan kesejahteraan di kalangan perempuan urban. Akumulasi ketidakadilan berbasis identitas sosial, lokasi geografis, dan gender ini menegaskan perlunya perencanaan kota yang lebih inklusif,

berkeadilan spasial, serta responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan perkotaan dalam akses layanan dasar dan kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, ruang geografis, dan bias gender yang terbangun dalam perencanaan kota. Ketimpangan ini mengakibatkan terhambatnya akses kelompok marginal terhadap perumahan, transportasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas kesehatan, sehingga memperkuat siklus kemiskinan perkotaan. Dalam konteks “Ketimpangan Perkotaan: Akses terhadap Layanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial”, upaya perbaikan harus melibatkan reformasi kebijakan berbasis intervensi yang terarah dan sensitif terhadap karakteristik sosial, spasial, dan gender. Tanpa adanya pendekatan yang komprehensif ini, ketimpangan perkotaan dikhawatirkan akan semakin melebar dan menciptakan ketidakstabilan sosial di wilayah perkotaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian sistematis terhadap hubungan antara migrasi, permukiman kumuh, dan ketimpangan perkotaan, dapat disimpulkan bahwa urbanisasi yang pesat telah menjadi pendorong utama transformasi demografis, perubahan penggunaan lahan, dan perkembangan infrastruktur kota secara bersamaan. Meskipun proses ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan, di sisi lain juga melahirkan berbagai permasalahan ekologis dan sosial seperti degradasi lingkungan, peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta ketegangan terhadap infrastruktur dasar yang ada. Permukiman kumuh muncul sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan antara arus migrasi dan kemampuan tata kelola kota dalam menyediakan hunian layak dan layanan dasar, sekaligus memperlihatkan ketimpangan sosial-ekonomi yang struktural di wilayah perkotaan. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti perumahan, sanitasi, air bersih, transportasi, dan kesehatan di perkotaan

pun semakin menguat akibat faktor sosial, spasial, dan gender, yang memperparah siklus kemiskinan dan kerentanan sosial.

Urgensi riset ke depan terletak pada pengembangan model tata kelola kota yang **terintegrasi secara spasial dan sosial**, yang mampu menjelaskan secara holistik interaksi antara migrasi, pertumbuhan permukiman kumuh, dan ketimpangan akses layanan dasar. Selain itu, diperlukan penelitian longitudinal berbasis bukti untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perkotaan inklusif dalam kerangka **Sustainable Development Goals (SDGs)**, guna menekan ketimpangan dan meningkatkan resiliensi komunitas marjinal di kawasan urban.

Daftar Pustaka

- Andini, Y., Nilhak, Z., Fajriansyah, D., & Pratama, I. N. (2024). *Analisis Dinamika Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur : Studi Kasus Flores*. 13.
- Arefin, S. (2023). Right to the city in the age of neoliberal development: A case study of two slum communities in Dhaka, Bangladesh. *Society Register*, 7(2), 49–70. <https://doi.org/10.14746/sr.2023.7.2.04>
- Barbarino, R., Räuchle, C., & Scholz, W. (2021). Migration-led institutional change in urban development and planning. *Urban Planning*, 6(2), 1–6. <https://doi.org/10.17645/up.v6i2.4356>
- Bashir, F. (2023). Exploring the Influence of Urbanization, Trade, Human Capital, FDI and Money on Poverty in case of Selected Developing Countries. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 6(2), 325–335. <https://doi.org/10.47067/ramss.v6i2.333>
- Changsoo, R. (2023). Changing Dynamics of Urbanization and Social Inequality: A Case Study of Informal Settlements in Bangkok, Thailand. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 377–387. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i3.757>

- Cortinovis, C., Geneletti, D., & Haase, D. (2022). Higher immigration and lower land take rates are driving a new densification wave in European cities. *Npj Urban Sustainability*, 2(1). <https://doi.org/10.1038/s42949-022-00062-0>
- Garriga, C., Hedlund, A., Tang, Y., Wang, P., Azariadis, C., Bond, R., Bullard, J., Chen, K., Davis, M., Guo, J.-T., Herrendorf, B., Holmes, T., Monge-Naranjo, A., Shin, Y., Schlagenhauf, D., Ravikumar, B., Romer, P., Spence, M., Nieuwerburgh, S. Van, & Wen, Y. (2023). *NBER WORKING PAPER SERIES RURAL-URBAN MIGRATION, STRUCTURAL TRANSFORMATION, AND HOUSING MARKETS IN CHINA Rural-Urban Migration, Structural Transformation, and Housing Markets in China*. <http://www.nber.org/papers/w23819>
- Golding, S. A., & Winkler, R. L. (2020). Tracking Urbanization and Exurbs: Migration Across the Rural–Urban Continuum, 1990–2016. *Population Research and Policy Review*, 39(5), 835–859. <https://doi.org/10.1007/s11113-020-09611-w>
- Graham, S., Muir, N. M., Formsma, J. W., & Smylie, J. (2023). First Nations, Inuit and Métis Peoples Living in Urban Areas of Canada and Their Access to Healthcare: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(11), 5956. <https://doi.org/10.3390/ijerph20115956>
- Manana, M. N. G. (2023). The Evolution, Formation and Development of Namatala Slum of Mbale Municipality, Uganda. *Research Journal of Education, Teaching and Curriculum Studies*, 1(1), xx–xx. <https://doi.org/10.58721/rjetcs.v1i1.169>
- Mishra, V. K. (2023). Caste and Religion Matters in Access to Housing, Drinking Water, and Toilets: Empirical Evidence from National Sample Surveys, India. *CASTE / A Global Journal on Social Exclusion*, 4(1), 24–45.

- <https://doi.org/10.26812/caste.v4i1.654>
- Pratama, I. N. (2023). Dinamika Kemiskinan di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 2(April), 1216–1222.
- Samuel T Ariaratnam, & Bahaa Chammout. (2021). Underground space development resulting from increased urban migration. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 8(2), 046–055. <https://doi.org/10.30574/gjeta.2021.8.2.0093>
- Tariq, S. H., Ibrahim, M. A., Mannan, A. V., & Shoma, A. N. (2023). Transforming Slum Dwellings into Better Livable Units: An Approach through Minimum Intervention. *AIUB Journal of Science and Engineering*, 22(1), 24–34. <https://doi.org/10.53799/ajse.v22i1.300>
- Utari, D. (2023). Legal Review of The Implementation of Public Housing Assistance and Residential Areas in Palembang. *Veteran Law Review*, 6(1), 105–121.
- Vives-Miró, S. (2022). The urbanization of poverty: rethinking the production of unjust geographies. *Fennia*, 200(1), 41–51. <https://doi.org/10.11143/fennia.103192>
- Wang, X., Qi, W., Liu, S., Liu, Z., Gao, P., & Jin, H. (2022). The settlement intention of urban-to-urban migrants in China: Spatial differences and driving factors. *Journal of Geographical Sciences*, 32(12), 2503–2524. <https://doi.org/10.1007/s11442-022-2058-6>
- Xiao, Y., Yin, K., & Pan, L. (2022). STUDY ON THE CHANGE OF LIVELIHOOD CAPITAL OF POVERTY ALLEVIATION FARMERS IN HILLY AND MOUNTAINOUS AREAS OF SOUTHWEST CHINA AND ITS REGULATION ON PEOPLE'S ANXIETY. *International Journal of Neuropsychopharmacology*, 25(Supplement_1), a78–a78. <https://doi.org/10.1093/ijnp/pyac032.106>

- Yamamura, S. (2022). From global city makers to global city-shapers: Migration industries in the global city networks. *Urban Studies*, 59(11), 2234–2254. <https://doi.org/10.1177/00420980221087927>
- Zhang, M., Du, H., Zhou, G., Mao, F., Li, X., Zhou, L., Zhu, D., Xu, Y., & Huang, Z. (2022). Spatiotemporal Patterns and Driving Force of Urbanization and Its Impact on Urban Ecology. *Remote Sensing*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/rs14051160>
- Zuluaga, L. M., & Vargas, A. G. (2020). Spatial (In)justice and the social production of informal settlements in Colombia | A (In)justiça espacial e a produção social dos assentamentos informais na Colômbia | La (In)justicia espacial y la producción social de los asentamientos informales en Col. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 29(1), 118–132. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v29n1.73099>.Art